

**ANALISIS PENGARUH PDRB, JUMLAH PASAR TRADISIONAL,
JUMLAH INDUSTRI DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA EKS
KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2011-2017**

**Aji Bayu Bintoro
20150430190**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : Ajibayubintoro@gmail.com

Intisari : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Pasar Tradisional, Jumlah Industri, dan Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, dan berbagai instansi pemerintah lainnya. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) dengan menggunakan alat analisis regresi Eviews 10. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial atau individu, variabel PDRB, Jumlah Pasar Tradisional, dan Penanaman Modal Asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan variabel Jumlah Industri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata kunci : PAD, PDRB, Industri, Pasar Tradisional, PMA

Abstract : *The purpose of this research was to determine the influence of local gross domestic products (LGDP), number of traditional markets, number of industries, and foreign capital investments on original local government revenue (PAD) of former residency of Surakarta (country subdivision during Dutch East Indies period) in 2011-2017. This research used secondary data in the form of panel data taken from Statistics Indonesia (BPS), and other government institutions. The method used for data analysis is panel data regression of fixed effect model (FEM) using Eviews 10 as the regression analysis tool.*

Based on the result of the analysis, all independent variables simultaneously influenced the original local government revenue (PAD). Partially or individually, the variable of LGDP, the number of traditional markets, and the foreign capital investments had positive and significant influences on original local government revenue. On the other hand, the variable of total industry did not have any significant effect on PAD.

Keywords : *original local government revenue, GRDP, industry, traditional markets, foreign capital investments*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini berjalan di Indonesia menjadikan perubahan pada tata kelola pemerintahan di daerah, pengelolaan yang semula dikendalikan terpusat oleh pemerintah pusat sekarang pemerintah daerah mempunyai peran yang lebih banyak untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU NO.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan membiayai kebutuhannya guna melaksanakan pembangunan. Berdasarkan Bab IV pasal 5 UU NO.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penerimaan daerah dan pembiayaan yang kemudian untuk menjalankan desentralisasi bersumber dari : (a) pendapatan asli daerah ; (b) dana perimbangan ; (c) lain-lain pendapatan.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2007). Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai tolak ukur atau dasar seberapa daerah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada dasarnya jika jumlah pendapatan asli daerah semakin besar maka semakin besar pula kontribusinya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat semakin menurun. Pendapatan asli daerah (PAD) menurut pasal 6 UU NO.33 Tahun 2004 bersumber dari : (a) Pajak Daerah ; (b) Retribusi Daerah ; (c) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan (d) lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dari pendapatan asli daerah (PAD).

TABEL 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta
Tahun 2011-2017 (juta rupiah)

Tahun	Kota Surakarta	Kab. Klaten	Kab. Boyolali	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen
2011	181.097	72.294	96.489	96.167	77.142	104.081	94.519
2012	231.672	84.756	127.725	164.954	100.037	116.707	127.696
2013	298.401	115.454	160.753	192.972	111.593	161.724	146.722
2014	335.660	177.922	227.516.5	264.814	174.408	215.299	254.392
2015	372.798	190.623	260.634	313.948	211.209	255.443	267.712
2016	425.503	224.198	292.310	363.163	218.605	301.308	297.176
2017	527.544	371.718	388.015	464.567	333.840	412.876	404.556
Rata-rata	338.954	176.709	221.920	265.798	175.262	223.920	227.539

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 – 2018

Tabel 1 adalah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011 – 2017. Berdasarkan tabel di atas rata-rata tertinggi realisasi pendapatan asli daerah adalah PAD Kota Surakarta dengan rata-rata 338.954 juta rupiah per tahun, selanjutnya diikuti Kabupaten Sukoharjo dengan rata-rata 265.798 juta rupiah per tahun, kemudian diikuti Kabupaten Sragen dengan rata-rata realisasi PAD sebesar 227.539 juta rupiah per tahun, kemudian Kabupaten Karanganyar dengan rata-rata 223.920 juta rupiah per tahun, disusul Kabupaten Boyolali dengan rata-rata per tahun sebesar 221.920 juta, diurutkan dua terendah adalah Kabupaten Klaten dengan rata-rata 176.709 juta rupiah per tahun diikuti Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata 175.262 juta rupiah per tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB atas tahun konstan mengindikasikan perkembangan riil ekonomi suatu daerah secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Hubungan PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional. Dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan penerimaan daerah, dengan peningkatan penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan dapat memacu produktivitas masyarakat.

Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian di masyarakat. Pasar juga dapat dikatakan obyek vital yang menjadi lahan mata pencaharian masyarakat. Bagi pemerintah daerah, pasar tradisional juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan adanya banyak pedagang dan juga pembeli yang ada di pasar maka potensi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi daerah akibat dari penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Artinya, semakin banyak jumlah pasar tradisional yang ada di suatu daerah, maka potensi pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin meningkat.

Perkembangan industri di Indonesia memberikan berbagai dampak kepada daerah yang memiliki banyak perindustrian. Peningkatan jumlah industri juga akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sekitar karena akan menyerap banyak tenaga kerja. Adanya industri juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga pendapatan asli daerah otomatis akan meningkat dan nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik. Secara umum perkembangan perindustrian di daerah akan memberikan dampak yang positif dari segi ekonomi kepada daerah baik kesejahteraan masyarakat maupun penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Penanaman modal di suatu daerah akan memacu pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Adanya investasi yang masuk akan meningkatkan perekonomian daerah sebab akan memacu sektor-sektor ekonomi daerah. Dampak yang akan terjadi adalah penyerapan tenaga kerja berpotensi meningkat dan daya beli masyarakat meningkat juga. Adanya peningkatan perekonomian memberikan peluang peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dijelaskan mengenai keterkaitan antara PDRB, jumlah penduduk, jumlah industri, dan investasi asing terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Pasar Tradisional, Jumlah Industri, dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2017**”.

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2011 – 2017
2. Pengaruh Jumlah Pasar Tradisional terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2011 – 2017
3. Pengaruh Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2011 – 2017
4. Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dalam UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Keuangan Daerah adalah sesuatu yang dapat berbentuk dana ataupun barang yang dimiliki suatu daerah yang sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU NO.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses pelayanan administrasi kepada masyarakat maupun berbagai pembangunan yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU NO.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber keuangan daerah berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU NO.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari :

a. Pajak Daerah

Menurut UU NO. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mangkoesobroto (1994), definisi dari pajak (termasuk pajak daerah) adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, dimana pungutan tersebut bersifat memaksa kepada wajib pajak dan tidak ada balas jasa yang secara langsung. Pajak daerah merupakan salah satu komponen terbesar pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran pajak daerah sangatlah strategis bagi daerah, bersama dengan retribusi daerah, pajak daerah adalah sumber utama penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, (g) Pajak Parkir, (h) Pajak Air Tanah, (i) Pajak Sarang Burung Walet, (j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya juga diterangkan yang menjadi wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang merupakan laba dari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dividen dan penjualan saham milik daerah termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan UU NO. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil usaha perangkat Pemerintah Daerah serta bukan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas, juga bukan merupakan hasil pelaksanaan kewenangan perangkat daerah yang bersangkutan. Penerimaan daerah ini bukan merupakan bagian dari pajak daerah, retribusi daerah, dan juga bukan dari hasil perusahaan daerah. Menurut peraturan perundang-undangan yang tertuang pada UU NO.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari : (a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (b) jasa giro, (c) Pendapatan bunga, (d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

B. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. PDRB berdasarkan cara perhitungannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Cara perhitungan jenis PDRB atas dasar harga berjalan berdasarkan harga barang dan harga jasa tertentu, sedangkan cara perhitungan jenis PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada suatu tahun tertentu biasanya disebut tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan menjadi tiga pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Pengeluaran

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan pengeluaran adalah jumlah keseluruhan konsumsi yang dilakukan rumah tangga dan swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi yang dilakukan pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor dikurangi impor di suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

2. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan pendapatan adalah jumlah total balas jasa yang diterima dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Faktor-faktor produksi yang dimaksud adalah sewa tanah, upah atau gaji, bunga modal, dan keuntungan.

3. Pendapatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi adalah jumlah keseluruhan nilai tambah dari hasil proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu.

C. Hubungan PDRB dengan Pendapatan Asli Daerah

Hubungan yang terjadi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hubungan fungsional. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) merupakan fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan PDRB akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Selanjutnya diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan meningkat dan menjadi pendorong peningkatan produktivitas.

D. Hubungan Pasar Tradisional dengan Pendapatan Asli Daerah

Pasar tradisional adalah salahsatu tempat dimana terjadinya interaksi antara penjual pembeli. Pasar merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian di masyarakat. Pasar juga dapat dikatan obyek vital yang menjadi lahan mata pencaharian masyarakat. Bagi pemerintah daerah, pasar tradisional juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan adanya banyak pedagang dan juga pembeli yang ada di pasar maka potensi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi daerah akibat dari penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Artinya, semakin banyak jumlah pasar tradisional yang ada di suatu daerah, maka potensi pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin meningkat. Meskipun masih jarang bukti empiris yang menyatakan jumlah pasar memiliki pengaruh terhadap PAD, namun dengan banyaknya jumlah pasar tradisional berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

E. Hubungan Industri dengan Pendapatan Asli Daerah

Teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari suatu negara dalam menyediakan berbagai kebutuhan barang dari penduduknya, kenaikan kapasitas dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi, kelembagaan, dan ideologi (Todaro, 2006). Karakteristik pertumbuhan ekonomi adalah perubahan struktural ekonomi, salah satu cirinya adalah pergeseran secara

bertahap aktivitas pertanian atau agraris menuju sektor non pertanian seperti industri. Perkembangan industri di Indonesia akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah. Adanya industri yang ada di daerah, akan memberikan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi yang dapat dikenakan dari kegiatan yang dilakukan sektor industri di daerah. Penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat dengan adanya industri sehingga pengangguran berkurang dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat.

F. Hubungan PMA dengan Pendapatan Asli Daerah

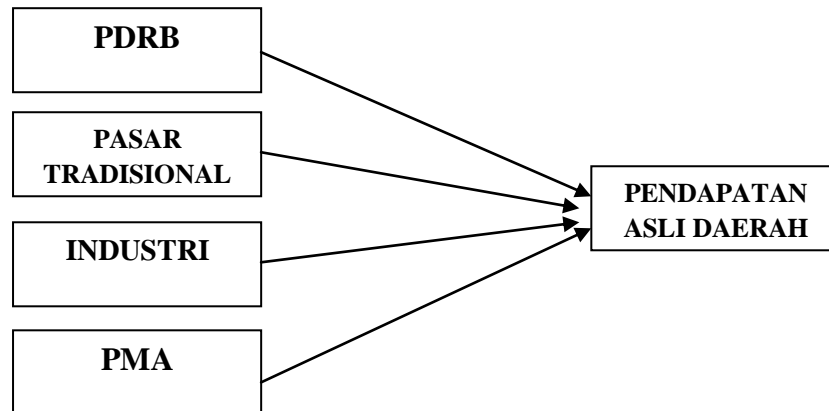
Teori Neo Klasik menekankan bahwa investasi akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Solow dan Swan berpendapat bahwa interaksi antara pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010). Teori Harrod-Domar menekankan bahwa pembentukan modal akan menambah tingkat kemampuan perekonomian dalam menghasilkan output yang dapat berupa barang dan jasa. Apabila pada suatu masa dilakukan pembentukan modal, pada masa atau generasi selanjutnya perekonomian akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar (Sadono, 2007). Shumpeter berpandangan bahwa peran pengusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha dituntut untuk senantiasa melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan ekonomi. Untuk melakukan berbagai inovasi tentunya diperlukan modal dan ia berpendapat bahwa investasi akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara (Todaro, 2006). Peningkatan kegiatan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat sehingga mendorong perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang yang lebih banyak dan juga investasi baru. Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya penanaman modal di suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penanaman modal dapat memicu kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan berpotensi menambah kesempatan kerja. Semakin banyak investasi atau penanaman modal asing akan berpotensi meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

G. Hipotesis

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta.
2. Jumlah Pasar Tradisional diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta.
3. Jumlah Industri diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta.

4. Penanaman Modal Asing diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta.

H. Model Penelitian



GAMBAR 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

A. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah PDRB, jumlah pasar tradisional, jumlah industri, dan penanaman modal asing. Adapun subyek penelitiannya adalah kabupaten/kota di kawasan eks Karesidenan Surakarta yang terdiri dari Surakarta, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data sekunder dan berbentuk data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* dalam bentuk tahunan dalam periode 2011 sampai 2017. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, Badan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perdagangan kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.

C. Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017 dinyatakan dengan bentuk rupiah.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu. PDRB berdasarkan cara perhitungannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Cara perhitungan jenis PDRB atas dasar harga berjalan berdasarkan harga barang dan harga jasa tertentu, sedangkan cara perhitungan jenis PDRB atas dasar harga konstan berdasarkan harga pada suatu tahun tertentu biasanya disebut tahun dasar. Pada penelitian ini, PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017 yang dinyatakan dengan rupiah.

3. Jumlah Pasar Tradisional

Jumlah pasar tradisional pada penelitian ini adalah jumlah pasar tradisional yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah yang berada di suatu wilayah dalam hal ini tinggal di wilayah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta pada tahun 2011-2017 yang dinyatakan dalam satuan unit.

4. Jumlah Industri

Jumlah industri adalah jumlah unit industri besar yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang yang berada di wilayah kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017 berdasarkan pengelompokan menurut Badan Pusat Statistik yang dinyatakan dalam satuan unit.

5. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi langsung atau FDI yang ditanamkan/diinvestasikan oleh pihak asing di wilayah kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017 yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Data PMA pada penelitian ini didapatkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

D. Metode Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis data panel. Data panel adalah gabungan antara data *time*

series dan *cross section*. Metode estimasi regresi data panel dapat dilakukan menggunakan tiga pendekatan (Basuki 2017), ketiga pendekatan itu antara lain:

1. Common Effect Model

Common Effect Model adalah teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan mengkombinasikan antara data *time series* dan *cross section*. Pada common effect model, tidak memperhatikan dimensi waktu dan dimensi individu dengan asumsi bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai periode waktu dengan kata lain bahwa metode ini sama halnya dengan metode Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan kuadran terkecil. Model ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

2. Fixed Effect Model

Model Efek Tetap (Fixed Effect) mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel dengan model efek tetap menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep terjadi karena adanya perbedaan budaya pada setiap perusahaan seperti budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Pendekatan model ini juga sering disebut dengan *Least Square Dummy Variable* (LSDV) atau *Covariance Model*. Pada model ini estimasi dapat dilakukan tanpa pembobotan (*no weighted*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) dan dengan pembobotan (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukan estimasi dengan pembobotan adalah untuk mengurangi tingkat heterogenitas antar unit *cross section*. Penggunaan model ini tepat dilakukan untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data dapat lebih dinamis dalam interpretasi. Fixed effect model dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + i\alpha + X_{it}^1\beta_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

3. Random Effect Model

Model pendekatan efek acak ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin akan saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada model ini perbedaan intersep akan diakomodasi oleh *error terms* masing-masing daerah/perusahaan. Karena hal ini, maka model ini sering disebut model komponen error (*error component model*). Model ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + W_{it} \quad (3)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

TABEL 2
Uji Glejser

Variabel	Probabilitas
Konstanta	0.2785
LOG (PDRB)	0.4234
LOG (PS)	0.8484
LOG (IND)	0.2509
LOG (PMA)	0.9364

Sumber : Eviews, data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai probabilitas semua variabel di atas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

TABEL 3
Uji Multikolinearitas

	LOG(PDRB)	LOG(PS)	LOG(IND)	LOG(PMA)
LOG(PDRB)	1.0000	0.5069	0.5808	0.2090
LOG(PS)	0.5069	1.0000	0.4278	-0.0493
LOG(IND)	0.5808	0.4278	1.0000	0.3407
LOG(PMA)	0.2090	-0.0493	0.3407	1.0000

Sumber : Eviews, data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada nilai koefisien korelasi antar variabel independen yang melebihi 0,9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data variabel independen tidak terjadi masalah multikolinearitas.

B. Pemilihan Model Terbaik

1. Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan antara *common effect model* atau *fixed effect model* yang baik digunakan.

TABEL 4
Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Probabilitas
Cross-section F	41.310360	(6,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	98.878255	6	0.0000

Sumber : Eviews, data diolah

Menurut uji Chow yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* merupakan model terbaik digunakan pada penelitian ini dibanding *Common Effect Model*.

2. Uji Hausmann

Uji Hausmann dilakukan untuk menentukan model pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*) atau *Random Effect Model* yang terbaik / tepat digunakan untuk mengestimasi data panel.

TABEL 5
Uji Hausmann

Test Summary	Chi-sq. Statistic	Chi-sq. D.f.	Probabilitas
Cross-section random	34.340887	4	0.0000

Sumber : Eviews, data diolah

Menurut hasil uji Hausmann yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan untuk meregresi data panel pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

C. Hasil Regresi

TABEL 6

Hasil Estimasi Pengaruh PDRB, Jumlah Pasar Tradisional, Jumlah Industri, dan PMA Terhadap PAD Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta

Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Model	
	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta	-56.84721	-56.05896
Standar Error	3.779846	2.661151
Probabilitas	0.0000	0.0000
LOG(PDRB)	3.648447	4.161078
Standar Error	0.340000	0.191708
Probabilitas	0.0000	0.0000
LOG(PS)	1.969955	-0.294701
Standar Error	0.966331	0.429284
Probabilitas	0.0485	0.4960
LOG(IND)	0.006657	0.308482
Standar Error	0.241199	0.095050
Probabilitas	0.9781	0.0022
LOG(PMA)	0.037226	0.049186
Standar Error	0.015137	0.014557
Probabilitas	0.0186	0.0015
R²	0.972171	0.932777
F statistik	132.7464	152.6341
Probabilitas	0.000000	0.000000

Berdasarkan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model terbaik yaitu uji *Chow* dan uji *Hausmann* menyatakan bahwa *fixed effect model* adalah model terbaik yang dapat digunakan untuk mengestimasi data panel pada penelitian ini.

D. Hasil Estimasi Data Panel

TABEL 7

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Model
	Fixed Effect
Konstanta	-56.84721
Standar Error	3.779846
Probabilitas	0.0000
LOG(PDRB)	3.648447

Standar Error	0.340000
Probabilitas	0.0000
LOG(PS)	1.969955
Standar Error	0.966331
Probabilitas	0.0485
LOG(IND)	0.006657
Standar Error	0.241199
Probabilitas	0.9781
LOG(PMA)	0.037226
Standar Error	0.015137
Probabilitas	0.0186
R2	0.972171
F statistik	132.7464
Prob(F-statistik)	0.000000
Durbin-Waston stat	2.026937

Sumber : Eviews, data diolah

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.

$$\text{LOG(PAD)} = -56.84721 + 3.6484 \text{ LOG(PDRB)} + 1.9699 \text{ LOG(PS)} + 0.0066 \text{ LOG(IND)} + 0.0372 \text{ LOG(PMA)} + \text{et} \quad (4)$$

Dimana :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PS = Jumlah Pasar Tradisional

IND = Jumlah Industri

PMA = Penanaman Modal Asing

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi

et = Disturbance Error

E. Uji Statistik

1. Uji Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi regresi pengaruh PDRB, jumlah pasar tradisional, jumlah industri, dan PMA terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di eks Karesidenan Surakarta periode tahun 2011 - 2017, maka diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9721. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini dapat menerangkan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 97,21 % dan sisanya 2,79% dijelaskan variabel independen lainnya di luar model.

2. Uji F Statistik

Pengambilan keputusan pada uji F dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas variabel independen $> 0,05$ maka hipotesis H_0 diterima yang artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara simultan atau bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi maka dapat diketahui nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$, yang menyatakan bahwa secara bersama-sama atau simultan, variabel independen yang meliputi PDRB, jumlah pasar tradisional, jumlah industri, PMA berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta periode tahun 2011 – 2017.

3. Uji t Statistik

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen/bebas secara individual terhadap variabel dependen/terikat dengan asumsi variabel independe/bebas lainnya dianggap konstan.

TABEL 8
Hasil Uji t-statistik

Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Koefisien	Probabilitas
PDRB	3.648447	0.0000
Jumlah Pasar Tradisional	1.969955	0.0485
Jumlah Industri	0.006657	0.9781
PMA	0.037226	0.0186

Signifikansi : 5 %

Berdasarkan hasil estimasi, dapat diketahui pengaruh variabel-variabel independen secara individu terhadap pendapatan asli daerah dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Nilai probabilitas variabel PDRB menunjukkan angka 0.0000 dengan nilai koefisien 3.6484. Dapat diartikan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). nilai probabilitas variabel jumlah pasar tradisional sebesar 0.0485 dengan nilai koefisien sebesar 1.9699. Dapat diartikan bahwa variabel jumlah pasar tradisional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. nilai probabilitas variabel jumlah industri sebesar 0.9781 dengan nilai koefisien 0.0066. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel jumlah industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). nilai probabilitas penanaman modal asing (PMA) sebesar 0.0186 dengan nilai koefisien sebesar 0.0372. Hasil tersebut mempunyai arti bahwa variabel penanaman modal asing (PMA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

F. Pembahasan

1. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, maka didapat nilai koefisien Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta sebesar 3.6484 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta. Nilai koefisien sebesar 3.6484 memiliki arti apabila terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1% maka akan meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) sebesar 3,64 % dengan asumsi bahwa faktor-faktor lainnya dianggap konstan atau tetap.

Hubungan yang terjadi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hubungan fungsional. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) merupakan fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan PDRB akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Selanjutnya diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan meningkat dan menjadi pendorong peningkatan produktivitas (Santosa & Rahayu, 2005).

Peningkatan PDRB dari tahun ke tahun menandakan bahwa perekonomian di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tumbuh dan dengan meningkatnya PDRB setiap tahunnya akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD). Dengan peningkatan PDRB, akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen terbesar PAD. Hal itu bisa terjadi karena dengan adanya peningkatan PDRB menandakan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk membayar pajak sehingga penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi meningkat.

Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Mayza (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh” yang menyatakan secara parsial atau individu, variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kenaikan PDRB akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, karena dengan adanya peningkatan PDRB berarti pendapatan masyarakat menjadi naik sehingga kemampuan untuk membayar pajak akan meningkat pula. Peningkatan penerimaan PAD kemudian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik. Berdasarkan hasil yang telah disebutkan, dengan demikian bahwa hipotesis variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta dapat diterima.

2. Pengaruh Jumlah Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, maka didapat nilai koefisien Jumlah Pasar Tradisional kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta sebesar 1.9699 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0485. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Jumlah Pasar Tradisional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.

Bagi pemerintah daerah, pasar tradisional juga bisa menjadi salah satu faktor penerimaan pendapatan daerah. Dengan adanya banyak pedagang dan juga pembeli yang ada di pasar maka potensi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi daerah akibat dari penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah pasar tradisional yang ada di suatu daerah, maka potensi pendapatan asli daerah (PAD) juga semakin meningkat. Meskipun masih jarang bukti empiris yang menyatakan jumlah pasar memiliki pengaruh terhadap PAD, namun dengan banyaknya jumlah pasar tradisional berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil yang menyatakan bahwa jumlah pasar tradisional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis variabel jumlah pasar tradisional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017 terbukti pada penelitian ini.

3. Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, maka didapat nilai koefisien Jumlah Industri kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta sebesar 0.0066 dengan nilai probabilitas sebesar 0.9781 . Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Jumlah Industri memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta.

Hasil yang menyatakan jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta disebabkan banyak faktor, salah satunya karena perkembangan jumlah industri besar relatif kecil setiap tahunnya dan industri yang ada di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta kebanyakan adalah industri berkembang. Selain alasan sebelumnya, pajak yang dipungut dari kegiatan industri besar sebagian besar masuk ke dalam pajak yang dikelola pemerintah pusat seperti PPh (pajak penghasilan) badan usaha atau perusahaan dan juga pemilik usaha sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, hal ini dibuktikan dengan data bahwa pajak penghasilan dari industri manufaktur besar menyumbang sebagian besar penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas setiap tahun untuk negara. Berdasarkan laporan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak penghasilan nonmigas mencapai 596,89 triliun, dari jumlah itu industri manufaktur memiliki kontribusi sebesar 31,9 persen. Hal ini juga diperkuat dengan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB tahun 2017 sebesar 22 persen. Beberapa fakta yang ada penerimaan pajak dan retribusi seperti pajak reklame dan retribusi jenis jasa usaha yang diterima daerah relatif kecil dengan kata lain insentif yang diberikan industri besar ke daerah dampaknya kurang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini yang menyatakan bahwa jumlah industri tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis variabel jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017 tidak terbukti pada penelitian ini.

4. Pengaruh PMA Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan, maka didapat nilai koefisien Penanaman Modal Asing (PMA) kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta sebesar 0.0372 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0186. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel PMA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota eks

Karesidenan Surakarta. Nilai koefisien sebesar 0.0372 memiliki arti apabila terjadi peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 1% maka akan meningkatkan Pendapatan asli Daerah (PAD) sebesar 0,37 % dengan asumsi bahwa faktor-faktor lainnya dianggap konstan atau tetap.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Ifrizal (2014) dengan judul “Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya Pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)” yang menyatakan bahwa secara parsial investasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian lain yang dilakukan Wei (2000) menyatakan bahwa investasi memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah melalui insentif terhadap pendapatan daerah provinsi-provinsi di China.

Penanaman modal di suatu daerah akan memacu pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Adanya investasi yang masuk akan meningkatkan perekonomian daerah sebab akan memacu sektor-sektor ekonomi daerah. Dampaknya adalah penyerapan tenaga kerja yang meningkat dan daya beli masyarakat meningkat juga. Adanya peningkatan perekonomian memberikan peluang peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Teori Neo Klasik menekankan bahwa investasi akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sollow dan Swan berpendapat bahwa interaksi antara pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010). Teori Harrod-Domar kemudian muncul dengan tetap mempertahankan pendapat para ahli ekonomi yang terdahulu dengan merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes yang menekankan bahwa penanaman modal atau akumulasi modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar menekankan bahwa pembentukan modal akan menambah tingkat kemampuan perekonomian dalam menghasilkan output yang dapat berupa barang dan jasa. Apabila pada suatu masa dilakukan pembentukan modal, pada masa atau generasi selanjutnya perekonomian akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar (Sadono, 2007).

Hasil yang menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis variabel Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta dapat diterima dan terbukti pada penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh PDRB, jumlah penduduk, jumlah industri dan penanaman modal asing terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta tahun 2011-2017, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah pasar tradisional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Artinya peningkatan jumlah pasar tradisional akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Artinya peningkatan jumlah industri dalam hal ini industri besar akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi tidak signifikan pengaruhnya. Penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta. Artinya peningkatan penanaman modal asing (PMA) akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan dugaan awal karena dengan adanya penanaman modal asing maka potensi-potensi yang ada di daerah akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran yang perlu dilakukan tindak lanjut dari berbagai pihak terkait dengan permasalahan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota eks Karesidenan Surakarta, yaitu :

1. Pemerintah diharapkan untuk fokus mengembangkan dan menggali potensi-potensi sumber daya serta potensi ekonomi yang tersedia di daerah sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat agar kemandirian finansial daerah juga semakin tinggi sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah.
2. Pemerintah diharapkan membenahi berbagai regulasi mengenai perijinan investasi maupun perijinan pendirian usaha yang terlalu rumit sehingga dapat menghambat perekonomian di daerah dengan catatan tidak berbenturan dengan regulasi di atasnya. Selain itu diharapkan Pemerintah bersama pihak-pihak terkait termasuk masyarakat menjaga kestabilan keamanan di daerah untuk memberikan rasa nyaman dan optimis kepada investor sehingga investasi yang masuk ke daerah berpotensi semakin meningkat. Karena dengan adanya peningkatan penanaman modal dan pertumbuhan industri di daerah akan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang mengatur pajak yang ditarik dari kegiatan penanaman modal asing lebih besar dari penanaman modal dalam negeri dan juga mensyaratkan kepada investor asing untuk

menanamkan modalnya dengan orientasi investasi padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan juga akan mengurangi pengangguran di daerah.

4. Pemerintah daerah disarankan meningkatkan pengawasan serta memperbaiki sistem pembayaran pajak daerah seperti penggunaan sistem pembayaran pajak secara online untuk menekan kebocoran-kebocoran penerimaan pajak daerah sehingga dapat berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
5. Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan perbaikan sarana-sarana publik seperti revitalisasi pasar tradisional sehingga tidak ada stigma bahwa pasar tradisional seolah-olah kumuh yang memnyebabkan masyarakat enggan berkunjung ke pasar tradisional dan melakukan penertiban atau relokasi kepada pedagang-pedagang liar yang tidak berizin sehingga dengan adanya penertiban atau relokasi akan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi-retribusi.
6. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan pendalaman yang lebih kompleks dengan menggunakan variabel-variabel lainnya misalnya variabel jumlah industri menengah dan kecil sehingga akan memberikan informasi yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Boyolali Dalam Angka Tahun 2011-2017*. Boyolali: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2018. *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2011-2017*. Karanganyar: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2018. *Kabupaten Klaten Dalam Angka Tahun 2011-2017*. Klaten: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2018. *Kabupaten Sragen Dalam Angka Tahun 2011-2017*. Sragen: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2018. *Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2011-2017*. Sukoharjo: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2018. *Kabupaten Wonogiri Dalam Angka Tahun 2011-2017*. Wonogiri: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2018. *Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2011-2017*. Surakarta: Badan Pusat Statistik.

- _____. 2018. *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: Badan Pusat Statistik.
- Basuki, A. T. 2017. *Ekonometrika dan Aplikasi Dalam Ekonomi*. Yogyakarta.
- Halim, A., 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ifrizal, dkk. 2014. "Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya Pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 33-41.
- Mangkoesebroto, G. 1994. *Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mayza, dkk. 2015. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh". *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 9-16.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Realisasi PMA2011-2016. <http://data.jatengprov.go.id/fi/dataset/realisasi-investasi-pma-2011-2016/resource/cbc3bb82-727c-43f9-930c-6de5b3720d8e>, Diakses tanggal 14 Desember 2018 pukul 14.30 WIB.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara.
- _____. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara.
- _____. 1962. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Sekretariat Negara.
- Sadono, S. 2007. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Todaro, dkk. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Wei, Y. D. 2000. "Investment and Regional Development in Post-Mao China". *Geo Jurnal*, volume 51, 169-179.